

ANALISIS KEPENTINGAN *STAKEHOLDER* DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI HUTAN DESA NAMO KECAMATAN KULAWI

Wahyu¹⁾, Golar²⁾, Sudirman Dg. Massiri²⁾

Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Tadulako
Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Palu, Sulawesi Tengah 94118

¹⁾Mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako

Korespondensi: wahyu_f.hut14@yahoo.co.id

²⁾Staf Pengajaran Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako

Abstract

This study aims to determine stakeholder interests in community empowerment programs in Namo Village Forest, Kulawi District. This study uses a qualitative method, sampling is done by purposive sampling the number of respondents 8. The analysis used is the analysis of influence and importance. The results showed that the level of influence and interests of stakeholders in community empowerment in Namo Village Forest is very diverse, which can be classified as stakeholders who are in the position of Key Player, Subject, Crowd and Context Setter. The stakeholders are Namo Village Forest Management Institute (LPHD), Central Sulawesi Provincial Forestry Service (DISHUT), HL Palu-Poso BPDAS, Kulawi Forest Management Unit (KPH), Kulawi Community and Village Empowerment Office (DPMD) Sigi, IMUNITAS (NGO), The Jembata Foundation (NGO) and the Namo.No Adat Institution. Stakeholders who play a role in empowerment in the Namo Village Forest are stakeholders from government agencies, private agencies and community leaders. The pattern of stakeholder relationships that occur in the community empowerment program in Namo Village Forest, there are three (3) patterns of stakeholder relationship criteria, namely communication, coordination and cooperation.

Keywords: *Interests, Stakeholders, Empowerment.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia yang merupakan kekayaan sumber daya alam yang tak ternilai harganya dan wajib disyukuri. Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang telah nyata bagi kehidupan, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu sumber daya alam hutan harus dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara kesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun akan datang.

Saat ini sumber daya alam masih menjadi sumber patokan pendapatan masyarakat sekitar hutan untuk kehidupan mereka, hal ini selalu berujung pada berkurangnya sumber daya alam, apabila masyarakat selalu memanfaatkan sumber daya alam tersebut tanpa memikirkan kerusakan alam, maka akan terjadi kerusakan hutan yang berdampak pada peluasan areal perkebunan bahkan dapat mengundang bencana alam. Untuk

mengantisipasi terjadinya kerusakan alam tersebut maka, pemerintah perlu melakukan tindakan berupa adanya larangan terhadap pengelolaan hutan dan memberikan akses terhadap pendapatan masyarakat melalui pembukaan lapangan kerja yang menjadi prioritas masyarakat yang ada disekitar kawasan hutan. Upaya Pemerintah dalam membuat program pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat misalnya dengan memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat melalui program pemberdayaan. Peningkatan taraf hidup berbasis program kelompok yang dilakukan masyarakat memerlukan sinergi yang kokoh dan terarah dari pemangku kepentingan dalam bidang tersebut, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat sendiri. Peran pemerintah lebih kepada formulasi dan penetapan aturan, implementasi, monitoring dan evaluasi serta mediasi. Peran swasta yaitu kontribusi pada formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi. Dan masyarakat berpartisipasi dalam formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi (Teguh, 2004).

Pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari peran para pemangku kepentingan (*stakeholder*), diantaranya pemerintah sebagai pembuat dan penyusun kebijakan, swasta sebagai pelaku pemberdayaan, akademisi, masyarakat, maupun pihak lainnya. Peranan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan masyarakat dikawasan hutan menghadirkan konsepsi pemberdayaan yang tidak bisa dilakukan secara sendirian dan menuntut kebersamaan arah tindak dan keseimbangan para pemangku kepentingan. Konsepsi ini mengarah pada pemahaman tata kelola. Pemahaman tata kelola disampaikan oleh Muntasib (2009) yang merupakan mekanisme pengelolaan sumber daya, ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor pemerintah dan sektor *non*-pemerintah dalam suatu usaha kolektif.

Salah satu program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah yaitu berada di Hutan Desa Namo Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi. Program pemberdayaan masyarakat di Hutan Desa Namo saat ini masih berjalan yaitu, pemberdayaan masyarakat dengan melakukan penanaman rotan, budidaya anggrek dan pengembangan sumber daya alam yang ada di Hutan Desa dengan melibatkan *stakeholder-stakeholder* yang mampu mengembangkan Hutan Desa Namo.

Hal ini terkait dengan pemerintah dan lembaga *non*-pemerintah yang terlibat di dalamnya apakah benar-benar melaksanakan program dan menyentuh masyarakat atau hanya dijadikan sebagai kepentingan kelompok saja. Kajian terhadap program pemberdayaan masyarakat yang telah dan sedang dilaksanakan oleh pihak-pihak perlu dilakukan dalam upaya menemukan program yang tepat dalam upaya pemberdayaan masyarakat yang berada di Desa Namo. Hubungan kerjasama antar *stakeholder* dalam pemberdayaan masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan (Laksono, 2012).

Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimana Analisis kepentingan *stakeholder* dalam program pemberdayaan masyarakat Desa Namo di kawasan hutan desa berdasarkan tupoksi masing-masing *stakeholder*.

Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis kepentingan *stakeholder* dalam pemberdayaan masyarakat Desa Namo di kawasan Hutan Desa berdasarkan tupoksi masing-masing *stakeholder*.

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan, dapat dijadikan bahan informasi ilmiah tentang analisis kepentingan *stakeholder* dalam program pemberdayaan masyarakat.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Namo Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. Waktu penelitian ini selama 2 (Dua) bulan yaitu dari bulan Februari sampai dengan Maret 2018.

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: alat tulismenulis (polpen dan buku), kamera sebagai dokumentasi. Komputer digunakan untuk membantu dalam menganalisis data.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kusioner untuk wawancara mendalam sebagai instrumen pengumpulan data primer di lapangan.

Metode Penelitian

Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu :

Data Primer

Pengambilan data primer dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lapangan dan melakukan wawancara.

Data Sekunder

Data sekunder menggunakan data-data yang telah ada, selanjutnya dilakukan proses analisa dan interpretasi terhadap data-data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian.

Teknik Pengambilan Sampel

Penentuan dalam pengumpulan sampel dengan menggunakan kuisisioner dan wawancara mendalam (*indepth interview*), responden dipilih secara sengaja dengan menggunakan (*purposive sampling*). *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yakni sumber data dianggap paling tahu tentang apa yang di harapkan, sehingga mempermudah peneliti

menjelajahi obyek atau situasi sosial yang sedang diteliti (Sugiyono, 2017).

Pengambilan sampel ini didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Pemilihan responden didasarkan dengan pertimbangan bahwa responden adalah anggota kelompok dan pernah terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat.

Analisis stakeholder

Analisis *stakeholder* digunakan untuk menganalisis tingkat pengaruh dan kepentingan *stakeholder*.

Identifikasi stakeholder

Setelah para *stakeholder* teridentifikasi, maka langkah selanjutnya adalah klasifikasi *stakeholder*. Menurut Reed, et al. (2009) metode analisis menggunakan matriks pengaruh dan kepentingan dengan mengklasifikasikan *stakeholder* ke dalam *key player*, *context setter*, *subject* dan *crowd*.

Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Analisis Pengaruh dan Kepentingan (Reed et al. 2009). Pengukuran tingkat pengaruh *stakeholder* berupa lima pertanyaan yang diajukan melalui wawancara pada informan kunci, antara lain:

1. Pengaruh Pertama (P1): Bagaimanakah kondisi kekuatan *stakeholder* dalam pemberdayaan masyarakat di desa Namo ?
Kondisi kekuatan *stakeholder* meliputi opini atau pendapat, kebudayaan, pendidikan promosi, aturan atau pengawasan. Jika kondisi kekuatannya ≥ 4 diberi skor 5. Jika kondisi kekuatannya hanya ada tiga diberi skor 4, jika kondisi kekuatannya hanya ada dua diberi skor 3, jika kondisi kekuatannya hanya ada satu diberi skor 2, serta jika kondisi kekuatannya tidak ada diberi skor 1.
2. Pengaruh Kedua (P2): Bagaimanakah kondisi kelayakan *stakeholder* dalam pemberdayaan masyarakat di desa Namo ?
Kondisi kelayakan *stakeholder* meliputi sanksi administrasi, sanksi finansial, sanksi hukum dan sanksi moral. Jika kondisi kelayakannya ≥ 4 diberi skor 5. Jika kondisi kelayakannya hanya ada tiga diberi skor 4, jika kondisi kelayakannya hanya ada dua diberi skor 3, jika kondisi kelayakannya hanya ada satu diberi skor 2, serta jika kondisi kelayakannya tidak ada diberi skor 1.

3. Pengaruh Ketiga (P3): Bagaimanakah kondisi kompensasi *stakeholder* dalam pemberdayaan masyarakat di desa Namo ?
Kondisi kompensasi *stakeholder* meliputi pemberian gaji/upah, pemberian sebidang lahan, pemberian bantuan/kegiatan, pemberian *award* dan lainnya. Jika kondisi kompensasinya ≥ 4 diberi skor 5. Jika kondisi kompensasinya hanya ada tiga diberi skor 4, jika kondisi kompensasinya hanya ada dua diberi skor 3, jika kondisi kompensasinya hanya ada satu diberi skor 2, serta jika kondisi kompensasinya tidak ada diberi skor 1.
4. Pengaruh Keempat (P4): Bagaimanakah kondisi kepribadian *stakeholder* dalam pemberdayaan masyarakat di desa Namo ?
Kondisi kepribadian *stakeholder* meliputi karisma seseorang, kekuatan fisik, kecerdasan mental, kekayaan dan lainnya. Jika kondisi kepribadiannya ≥ 4 diberi skor 5. Jika kondisi kepribadiannya hanya ada tiga diberi skor 4, jika kondisi kepribadiannya hanya ada dua diberi skor 3, jika kondisi kepribadiannya hanya ada satu diberi skor 2, serta jika kondisi kepribadiannya tidak ada diberi skor 1.
5. Pengaruh Kelima (P5): Bagaimanakah kondisi kekuatan organisasi/kelembagaan *stakeholder* dalam pemberdayaan masyarakat di desa Namo ?
Kondisi kekuatan organisasi *stakeholder* meliputi kekuatan anggaran ($\geq 30\%$), kekuatan SDM (terdapat jenjang sarjana), kesesuaian bidang fungsi, kemampuan menjalin kerjasama/jejaring kerja dan pemberian perijinan. Jika kondisi kekuatan organisasinya ≥ 4 diberi skor 5. Jika kondisi kekuatan organisasinya hanya ada tiga diberi skor 4, jika kondisi kekuatan organisasinya hanya ada dua diberi skor 3, jika kondisi kekuatan organisasinya hanya ada satu diberi skor 2, serta jika kondisi kekuatan organisasinya tidak ada diberi skor 1.

Menurut Reed, et al. 2009 Tingkat kepentingan setiap *stakeholder* diukur menggunakan variable yang meliputi keterlibatan *stakeholder*, manfaat yang diperoleh *stakeholder*, bentuk upaya *stakeholder*, program kerja *stakeholder* dan tingkat ketergantungan

stakeholder dalam program pemberdayaan masyarakat Desa Namo. Pengukuran tingkat kepentingan *stakeholder* dalam Pemberdayaan masyarakat berupa lima pertanyaan yang diajukan melalui wawancara, antara lain:

1. Kepentingan Pertama (K1): Bagaimanakah bentuk keterlibatan *stakeholder* dalam pemberdayaan masyarakat desa Namo ? Bentuk keterlibatan *stakeholder* meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Jika keterlibatannya ≥ 4 diberi skor 5. Jika keterlibatan hanya ada tiga diberi skor 4, jika keterlibatan hanya ada dua diberi skor 3, jika keterlibatan hanya ada satu diberi skor 2, serta jika keterlibatannya tidak ada diberi skor 1.
2. Kepentingan Kedua (K2): Manfaat apa sajakah yang diperoleh *stakeholder* dari pemberdayaan masyarakat desa Namo ? Bentuk manfaat yang diperoleh *stakeholder* adalah sebagai sumber penerimaan, menciptakan lapangan kerja, membuka akses, promosi daerah dan mendorong pembangunan daerah. Jika manfaatnya ≥ 4 diberi skor 5. Jika manfaat hanya ada tiga diberi skor 4, jika manfaat hanya ada dua diberi skor 3, jika keterlibatan hanya ada satu diberi skor 2, serta jika manfaat tidak ada diberi skor 1.
3. Kepentingan Ketiga (K3): Bagaimanakah upaya *stakeholders* dalam pemberdayaan masyarakat desa Namo ? Bentuk-bentuk upaya *stakeholder* meliputi perlindungan dan pengamanan kawasan pemberdayaan, pembangunan sarana prasarana, memberikan layanan perijinan, pemberdayaan masyarakat setempat serta penyediaan data dan informasi. Jika kewenangannya ≥ 4 diberi skor 5. Jika kewenangannya hanya ada tiga diberi skor 4, jika kewenangannya hanya ada dua diberi skor 3, jika kewenangannya hanya ada satu diberi skor 2, serta jika kewenangannya tidak ada diberi skor 1.
4. Kepentingan Keempat (K4): Apa sajakah program kerja *stakeholder* terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa Namo ? Jika program kerja $> 20\%$ dalam Tupoksi *stakeholder* diberi skor 5. Jika program kerja 16-20% dalam Tupoksi *stakeholder* diberi skor 4, jika program kerja 11-15% dalam tupoksi *stakeholder* diberi skor 3, jika

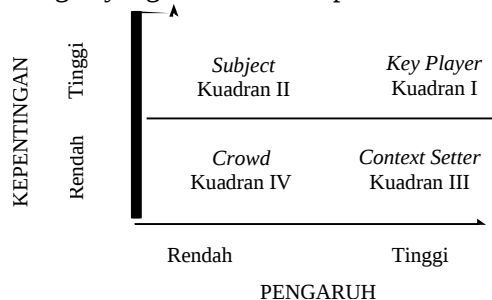
program kerja 6-10% dalam Tupoksi *stakeholder* diberi skor 2, serta jika program kerja $\leq 5\%$ dalam Tupoksi *stakeholder* diberi skor 1.

5. Kepentingan Kelima (K5): Bagaimana tingkat ketergantungan *stakeholder* dalam pemberdayaan masyarakat desa Namo ? Jika tingkat ketergantungan *stakeholder* 81-100% pemberdayaan masyarakat sebagai sumber pendapatan *stakeholder* diberi skor 5. Jika 61-80% pemberdayaan masyarakat sebagai sumber pendapatan *stakeholder* diberi skor 4, jika 41-60% pemberdayaan masyarakat sebagai sumber pendapatan *stakeholder* diberi skor 3, jika 21-40% pemberdayaan masyarakat sebagai sumber pendapatan *stakeholder* diberi skor 2, serta $\leq 20\%$ pemberdayaan masyarakat sebagai sumber pendapatan *stakeholder* diberi skor 1. Penetapan skor menggunakan panduan penilaian melalui pertanyaan untuk mengukur tingkat kepentingan *stakeholder* adalah modifikasi dari model yang dikembangkan oleh Abbas (2005) itu pengukuran data berjenjang lima yang bias jika pada Tabel 1.

Tabel 1. Ukuran kualitatif terhadap pengaruh dan kepentingan *Stakeholder*

No	Skor Nilai	Kriteria	Keterangan
Pengaruh Stakeholder			
1	0-5	Rendah	Tidak mempengaruhi program Pemberdayaan Masyarakat
2	6-10	Kurang Tinggi	Kurang mempengaruhi program Pemberdayaan Masyarakat
3	11-15	Cukup tinggi	Cukup mempengaruhi program Pemberdayaan Masyarakat
4	16-20	Tinggi	mempengaruhi program Pemberdayaan Masyarakat
5	21-25	Sangat Tinggi	Sangat mempengaruhi program Pemberdayaan Masyarakat
Kepentingan Stakeholder			
1	0-5	Rendah	Tidak mendukung program pemberdayaan masyarakat
2	6-10	Kurang Tinggi	Kurang mendukung program pemberdayaan masyarakat
3	11-15	Cukup Tinggi	Cukup mendukung program pemberdayaan masyarakat
4	16-20	Tinggi	Mendukung program pemberdayaan masyarakat
5	21-25	Sangat Tinggi	Sangat mendukung program pemberdayaan masyarakat

Jumlah skor yang di dapatkan masing-masing *stakeholder* adalah pengaruh bernilai 25 poin dan kepentingan bernilai 25 poin. Hasil penetapan skor terhadap tingkat pengaruh dan kepentingan masing-masing *stakeholder* tersebut dikelompokkan menurut jenis indikatornya dan kemudian disandingkan sehingga membentuk koordinat. Hasil analisis *stakeholder* diklasifikasikan menurut tingkat pengaruh dan kepentingan yang diilustrasikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Matriks pengaruh dan kepentingan (Reed, et al. 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

pemberdayaan masyarakat merupakan suatu bentuk upaya yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengembangkan, memandirikan, dan menswadayakan masyarakat agar mampu membuat suatu perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas potensi daerah (Hafizi, DKK 2016).

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap sejumlah informan yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam program pemberdayaan masyarakat di Hutan Desa Namo yaitu terdapat beberapa program kegiatan yang melibatkan masyarakat dan lembaga, adapun kegiatan dan keterlibatan *stakeholder* tersebut disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Kegiatan Dan Keterlibatan *Stakeholder*

No	Kegiatan	Keterlibatan
1.	Pembinaan masyarakat mengenai pengelolaan Hutan Desa	Lembaga dan Masyarakat
2.	Sosialisasi tentang cara mengelola dan memanfaatkan Hutan Desa	Lembaga dan Masyarakat
3.	Penanaman bibit (Rotan, jati, dan durian) di areal Hutan Desa	Lembaga dan Masyarakat
4.	Pelatihan dan pengembangan di bidang kursi rotan dan bamboo	Lembaga dan Masyarakat

Sumber: Data primer diolah tahun 2018.

Stakeholder Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Hasil identifikasi *stakeholder* yang terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat desa namo disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. *Stakeholder* yang terlibat dalam program pemberdayaan di Hutan Desa Namo

No	Stakeholder	Tupoksi	Kelompok
1	Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD)	Pengelola Hutan Desa	Kelompok Masyarakat
2	Dinas Kehutanan (DISHUT) Provinsi Sulawesi Tengah	Pembina, Pemantau, dan Mengevaluasi kinerja dari LPHD	Pemerintah Daerah
3	BPDAS HL Palu-Poso	Pembinaan dan Penyedia Bibit	Pemerintah Daerah
4	Kesatuan Pengelolahan Hutan (KPH) Kulawi	Sebagai pelaksana teknis lapangan, penyuluhan dan penyampaian informasi mengenai program pemberdayaan masyarakat di Hutan Desa Namo.	Pelaksana Teknis
5	DPMD Sigi	Pembinaan/Pemberian bantuan dalam pengelolaan hutan desa.	Pemerintah Daerah
6	IMUNITAS (LSM)	Fasilitator/Pendamping LPHD dalam program pemberdayaan masyarakat	Lembaga Swadya Masyarakat
7	Yayasan Jembata	Fasilitator/Pendamping LPHD dalam program pemberdayaan masyarakat	Lembaga Swadya Masyarakat
8	Lembaga Adat Namo	Melindungi Kawasan Hutan dengan aturan adat masyarakat Desa Namo	Kelompok Masyarakat

Sumber: Data Primer diolah tahun 2018.

Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) Kulawi

Lembaga Pengelolaan Hutan Desa merupakan kelompok masyarakat dalam pengelolaan hutan Desa Namo di Kecamatan Kulawi yang memiliki berbagai pengaruh dan kepentingannya, terutama di bidang program pemberdayaan masyarakat. Adapun tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Lembaga Pengelolaan Hutan Desa yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.89/Menhut-II/2014 tentang Hutan Desa. Program kerja yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) yaitu mengelola serta memanfaatkan hasil hutan yang ada di hutan Desa Namo dengan melibatkan kelompok masyarakat.

Dinas Kehutanan (DISHUT) Provinsi Sulawesi Tengah

instansi pemerintah yang memiliki pengaruh dan kepentingannya, terutama dalam pengelolaan Hutan Desa Namo, Adapun tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah dalam meningkatkan kualitas hutan desa yaitu pembinaan, pengembangan dan mengevaluasi setiap program dari Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) Namo.

BPDAS HL Palu-Poso

BPDAS HL Palu-Poso merupakan instansi pemerintah yang memiliki pengaruh dan juga kepentingan dalam Hutan Desa, terutama dengan daerah aliran sungai yang berada di kawasan

Hutan Desa. BPDAS HL Palu-Poso dalam pengelolaan Hutan Desa bekerja sama dengan Lembaga Pengelolaan Hutan Desa dalam budidaya rotan dimana dari pihak BPDAS HL Palu-Poso sendiri memberikan bantuan bibit yang siap untuk di budidayakan dikawasan Hutan Desa.

Menurut Woolcock (2000) dalam Nyoman (2011), menanam di kawasan hutan desa harus ada izin atau persetujuan secara tertulis dari pemerintah. keterkaitan antara modal sosial dan kinerja pemerintahan ditunjukkan oleh keadaan sosial ekonomi masyarakat diwilayah tersebut.

Kesatuan Pengelolahan Hutan (KPH) Kulawi

Kesatuan Pengelolahan Hutan (KPH) Kulawi merupakan instansi pemerintah daerah yang mempunyai pengaruh dan kepentingan dalam program pemberdayaan masyarakat dalam Hutan Desa Namo. Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kulawi yaitu memberikan informasi berupa penyuluhan terkait pengelolaan Hutan Desa Namo.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sigi

Menurut (Ngakan dkk., 2006) Masyarakat desa sekitar kawasan konservasi tidak luput dari permasalahan ini, yaitu terjadinya benturan antara kepentingan konservasi dengan kepentingan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (ekonomi). Akan tetapi pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sigi berupaya semaksimal mungkin untuk tidak terjadi benturan dengan *stakeholder* lain.

Peran sentral dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sigi yaitu membina Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) dan masyarakat untuk memahami pengelolaan Hutan Desa yang berkelanjutan.

Lembaga Swadaya Masyarakat (IMUNITAS)

Penguatan kelembagaan merupakan faktor penting dalam menyiapkan masyarakat untuk mengelola (Hakim, 2009). Hal ini perlu diperhatikan, karena pendampingan penguatan kelembagaan dapat membangun masyarakat yang mandiri dalam mengelola hutan.

Imunitas mempunyai peran sebagai pemberi fasilitas dan pendamping bagi Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) dalam menyelenggarakan program tersebut.

Lembaga Swadaya Masyarakat (Yayasan Jembata)

Yayasan Jembata merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang ikut berperan dalam program pemberdayaan masyarakat serta pengelolaan Hutan Desa Namo. Yayasan Jembata ini mempunyai fungsi (tupoksi) sebagai fasilitator/pendamping bagi Lembaga Pengelolaan Hutan Desa Namo, yayasan jembata juga aktif dalam memberikan penyuluhan bagi masyarakat

Desa Namo yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup.

Lembaga Adat Namo

Menurut (Mondo, DKK 2015) alternatif yang dapat digunakan dalam menanggulangi masalah konflik atas hutan adat adalah dengan menggunakan aturan dan kebiasaan setempat yang dikenal dengan sebutan hukum adat.

Lembaga Adat Namo merupakan tokoh masyarakat yang berperan dalam pengelolaan Hutan Desa Namo. Lembaga Adat Namo mempunyai fungsi (tupoksi) dalam perlindungan Hutan Desa dengan dasar aturan adat yang berlaku di Desa Namo.

Pengaruh Stakeholder Terhadap Kegiatan Pemberdayaan.

Pengukuran tingkat pengaruh *stakeholder* dalam pemberdayaan masyarakat Desa Namo menggunakan lima variabel yang meliputi kekuatan kondisi, kekuatan kelayakan, kekuatan kompensasi, kekuatan individu dan kekuatan organisasi (Galbraith 1983 diacu dalam Reed *et al.* 2009). Hasil perhitungan tingkat pengaruh masing-masing *stakeholder* dengan menggunakan panduan penilaian yang di sajikan pada tabel 4.

Tabel 4 Hasil perhitungan nilai tingkat pengaruh *stakeholder*

No	Stakeholder	Nilai					Total
		P1	P2	P3	P4	P5	
1	Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD)	4	3	3	3	5	18
2	Dinas Kehutanan (DISHUT) Provinsi Sulawesi Tengah	4	2	2	3	4	15
3	BPDAS HL Palu-Poso	3	2	2	2	2	11
4	Kesatuan Pengelolahan Hutan (KPH) Kulawi	4	2	2	3	3	14
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sigi	4	3	2	3	4	16
6	IMUNITAS (LSM)	3	2	2	2	2	11
7	Yayasan Jembata (LSM)	3	2	2	3	2	12
8	Lembaga Adat Namo	4	2	3	2	3	14

Sumber: Data primer diolah tahun 2018

Ket : P1 = Kekuatan kondisi; P2 = Kekuatan kelayakan; P3 = Kekuatan kompensasi; P4 = Kekuatan individu; P5 = Kekuatan organisasi.

Kepentingan Stakeholder Terhadap Kegiatan Pemberdayaan

Pengukuran tingkat kepentingan *stakeholder* dalam pemberdayaan masyarakat Desa Namo menggunakan lima variabel yang meliputi keterlibatan *stakeholder*, manfaat yang diperoleh *stakeholder*, bentuk kewenangan *stakeholder*,

program kerja *stakeholder* dan tingkat ketergantungan *stakeholder* dalam pemberdayaan masyarakat Desa Namo. Hasil perhitungan tingkat kepentingan masing-masing *stakeholder* dengan menggunakan panduan penilaian yang disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil perhitungan nilai tingkat kepentingan *stakeholder*

No	Stakeholder	Nilai					Total
		K1	K2	K3	K4	K5	
1	Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD)	5	5	4	5	5	24
2	Dinas Kehutanan (DISHUT) Provinsi Sulawesi Tengah	3	3	3	4	1	14
3	BPDAS HL Palu-Poso	2	4	3	4	3	16
4	Kesatuan Pengelolahan Hutan (KPH) Kulawi	2	4	3	2	2	13
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sigi	4	5	3	4	4	20
6	IMUNITAS (LSM)	3	4	2	2	3	14
7	Yayasan Jembata (LSM)	2	3	2	2	1	10
8	Lembaga Adat Namo	3	1	3	2	1	10

Sumber: Data primer diolah tahun 2018

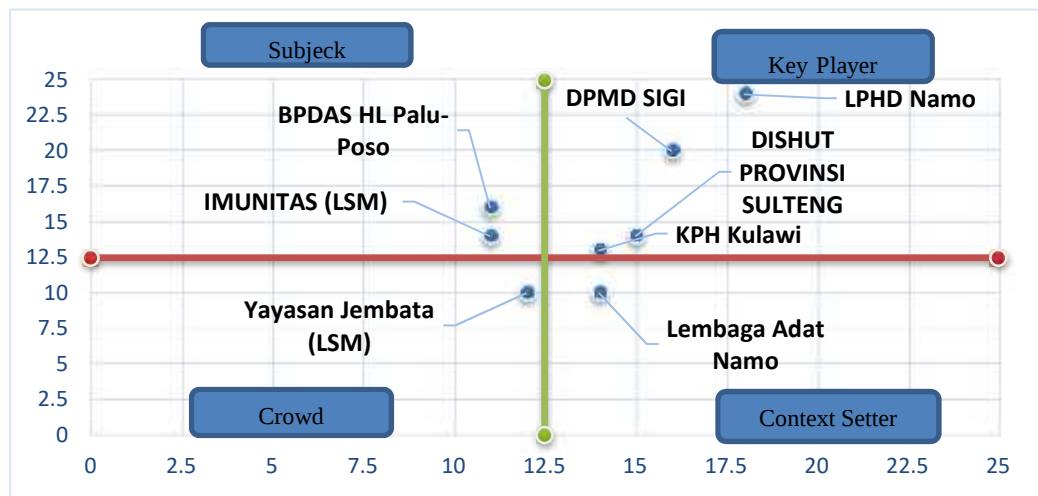
Keterangan : K1 = Bentuk keterlibatan; K2 = Manfaat yang diperoleh; K3 = Bentuk kewenangan; K4 = Program kerja; K5 = Tingkat ketergantungan.

Hasil analisis *stakeholder* diklasifikasikan menurut tingkat pengaruh dan kepentingan dengan menggunakan matriks menurut *Reed et al.* (2009) dapat dilihat pada Gambar 2. Matriks pengaruh dan kepentingan *stakeholder* tersebut menunjukkan bahwa masing-masing *stakeholder* memiliki klasifikasi yang berbeda sesuai dengan tingkat pengaruh dan kepentingannya dalam

Program Pemberdayaan Masyarakat di Hutan Desa Namo.

Peran *Stakeholder* Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Stakeholder yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat di Hutan Desa Namo memiliki peran dan posisi yang berbeda-beda terhadap kegiatan pemberdayaan, yang dilakukan seperti yang disajikan pada Gambar 2.

Gambar 2. Hasil Analisis Matriks pengaruh dan kepentingan *stakeholder*

Key player

Key player adalah *Stakeholder* yang mempunyai kepentingan tinggi dan pengaruh tinggi sehingga dianggap paling berperan dalam pengembangan suatu daerah. *Stakeholder* yang termasuk dalam kelompok *key player* adalah Lembaga Pengelola HD Namo, Dinas Kehutanan Provinsi (DISHUT), Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sigi, dan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) kulawi.

Subject

Subject adalah *Stakeholder* yang memiliki kepentingan tinggi tetapi pengaruhnya rendah. *Stakeholder* yang masuk dalam kategori subjek mempunyai kekuatan kecil untuk mengubah

situasi pemberdayaan, akan tetapi mereka dapat mempengaruhi *stakeholder* lain jika dapat bekerja sama dengan *stakeholder* lainnya. *Stakeholder* yang termasuk dalam kelompok *subject* adalah BPDAS HL Palu-Poso, dan IMUNITAS.

Context setter

Context Setter adalah *stakeholder* yang memiliki pengaruh yang tinggi tetapi sedikit kepentingan. *Stakeholder* ini merupakan *stakeholders* yang harus selalu diperhatikan karena bisa jadi *stakeholders* yang berperang dalam mempengaruhi *stakeholder* lainnya. *Stakeholder* yang termasuk dalam kelompok *context setter* adalah Yayasan Jembata.

Crowd

Crowd adalah *stakeholder* yang memiliki pengaruh dan kepentingan yang rendah. Namun demikian tetap menjadi pertimbangan untuk diikuti sertakan dalam pengambilan keputusan. *Stakeholder* yang termasuk dalam kelompok *crowd* adalah Lembaga Adat Namo.

Hubungan Antara Stakeholder

Hubungan antara *stakeholder* dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok (Riani 2012) meliputi hubungan komunikasi, koordinasi dan kerjasama. Ketiga hubungan tersebut dapat dijelaskan berdasarkan komponen pemberdayaan masyarakat di Hutan Desa yang meliputi konservasi, edukasi dan ekonomi.

Komunikasi

Bungin (2008) menjelaskan bahwa komunikasi adalah sebuah tindakan untuk berbagi informasi, gagasan ataupun pendapat dari setiap partisipan komunikasi yang terlibat didalamnya guna mencapai kesamaan makna.

Stakeholder yang memiliki hubungan komunikasi pada komponen edukasi adalah Lembaga Pengelolaan HD Sigi dengan Dinas Kehutanan (DISHUT) Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sigi. *Stakeholder* yang memiliki hubungan komunikasi pada komponen ekonomi adalah Dinas Kehutanan (DISHUT) Provinsi Sulawesi Tengah dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sigi. *Stakeholder* yang memiliki hubungan komunikasi pada komponen

konservasi adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDAS HL) Palu-Poso dan Lembaga Adat Namo Hubungan komunikasi pada komponen edukasi antara Dinas Kehutanan (DISHUT) Provinsi Sulawesi Tengah dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sigi yang menjelaskan tugas untuk melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan potensi kreatif, keilmuan, sosial dan budaya, kemudian berkolaborasi dengan Lembaga Pengelolaan HD Sigi dalam meningkatkan ke-kreatifan masyarakat dan anggota Lembaga Pengelolaan HD Namo tersebut.

Komunikasi yang terjalin sampai saat ini berjalan baik antara ketiga *stakeholder* tersebut dilihat dari program kerja yang dilaksanakan oleh setiap *stakeholder* dan selalu dikomunikasikan dan saling bekerjasama dalam menjalankan program kerja.

Koordinasi

Menurut G. R. Terry dalam Hasibuan (2006) menyebutkan bahwa koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Koordinasi mungkin tidak ada interaksi langsung antara organisasi, tetapi dimana organisasi mempertimbangkan kegiatan pihak yang lain dalam perencanaan yang dimilikinya (Suporahardjo 2005). *Stakeholder* yang memiliki hubungan koordinasi pada komponen ekonomi adalah Dinas Kehutanan (DISHUT) Provinsi Sulawesi Tengah dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sigi. Hubungan antara kedua instansi pemerintah tersebut berjalan dengan seimbang. Hubungan antara kedua instansi pemerintah tersebut disebut hubungan koordinasi horizontal, dimana hubungan koordinasi horizontal adalah hubungan koordinasi terhadap suatu tindakan atau kegiatan dalam tingkat instansi/organisasi yang setingkat atau sejajar.

Hubungan koordinasi pada komponen konservasi dan ekonomi antara Lembaga

Pemerintah yaitu Dinas Kehutanan (DISHUT) Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sigi. Dari hasil wawancara yang dilakukan menjelaskan bahwa tugas Dinas Kehutanan (DISHUT) Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pengawasan pemberdayaan. Tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sigi yang menjelaskan bahwa tugas mereka melakukan koordinasi, kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam bidang pertanian, dan peningkatan kualitas.

Hubungan koordinasi pada komponen konservasi yang terjadi di lapangan antara Dinas Kehutanan (DISHUT) Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sigi adalah mensinergikan program kerja dan kegiatan Dinas Kehutanan (DISHUT) Provinsi Sulawesi Tengah dengan rencana kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sigi serta berkoordinasi mengenai kegiatan Dinas Kehutanan (DISHUT) Provinsi Sulawesi Tengah baik dalam pembangunan fisik maupun hal lainnya terkait dengan pengembangan pemberdayaan serta kegiatan monitoring atau pemantauan. Kemudian Dinas Kehutanan (DISHUT) Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sigi menjelaskan bahwa tugas mereka untuk melakukan kegiatan kerjasama, promosi dan pengadaan serta pendistribusian bahan-bahan promosi hasil dari pemberdayaan masyarakat di Hutan Desa.

Kerjasama

Kerjasama (*cooperation*) adalah usaha bersama antara individu atau kelompok untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama (Bungin 2008). Kerjasama dilakukan untuk mencapai misi yang dimiliki mereka dan tujuan yang lebih efektif (Suporahardjo 2005). Kerjasama antar *stakeholder* dalam pemberdayaan masyarakat di Hutan Desa Namo merupakan hubungan kerjasama atas dasar tupoksi, aturan kelembagaan, serta kesamaan visi dan misi suatu lembaga dan instansi. Hubungan kerjasama *stakeholder* dalam Pemberdayaan

masyarakat di Hutan Desa Namo terletak pada komponen konservasi, edukasi dan ekonomi.

Hubungan kerjasama pada komponen konservasi terjadi antara Dinas Kehutanan (DISHUT) Provinsi Sulawesi Tengah dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sigi, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDAS HL) Palu-Poso, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sigi, Lembaga Pengolahan HD Sigi dan Lembaga Adat Namo. Hubungan kerjasama antara *stakeholder* tersebut cukup baik dikarenakan dengan adanya program tahunan dari beberapa *stakeholder* terkait dalam pemberdayaan masyarakat mereka selalu berkordinasi dan bekerjasama untuk tujuan mensejahterahkan masyarakat Desa Namo.

Hubungan kerjasama pada komponen edukasi antara Dinas Kehutanan (DISHUT) Provinsi Sulawesi Tengah dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sigi, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDAS HL) Palu-Poso, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sigi, Lembaga Pengolahan Hutan Desa (LPHD) Sigi dan Lembaga Adat Namo dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Hubungan kerjasamayang terjadi antara *stakeholder* tersebut cukup baik, dikarenakan dengan adanya penyuluhan dan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan aspek pemberdayan masyarakat yang di pogramkan oleh instansi pemerintah sangat diapresiasi oleh masyarakat Desa Namo.

Hubungan kerjasama pada komponen ekonomi terjadi antara Dinas Kehutanan (DISHUT) Provinsi Sulawesi Tengah dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sigi, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDAS HL) Palu-Poso, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sigi, Lembaga Pengolahan HD Sigi dan Lembaga Adat Namo. Hubungan kerjasama pada komponen ekonomi ini kurang berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan oleh minimnya sumberdaya manusia dan kurangnya teknologi yang digunakan dalam kegiatan pemberdayaan tersebut. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9. Hubungan Antara *Stakeholder* Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Di Hutan Desa Namo

	DPMD Sigi	DISHUT Provinsi	KPH Kulawi	BPDAS HL Palu-Poso	Imunitas (LSM)	Yayasan Jembata (LSM)	Lembaga Adat Namo
LPHD Namo	Baik	Baik	Baik	Baik	Cukup Baik	Cukup Baik	Baik
DPMD Sigi		Kurang baik	Baik	Baik	Cukup Baik	Cukup Baik	Baik
DISHUT Provinsi			Baik	Baik	Cukup Baik	Cukup Baik	Baik
KPH Kulawi				Baik	Cukup Baik	Cukup Baik	Baik
BPDAS HL Palu-Poso					Cukup Baik	Cukup Baik	Baik
Imunitas (LSM)						Cukup Baik	Baik
Yayasan Jembata (LSM)							Baik
Lemabaga Adat Namo							

Sumber: Data primer diolah tahun 2018.

Hasil analisis pada pola hubungan antara *stakeholder* diatas berdasarkan kesimpulan dari kriteria pola hubungan antara *stakeholder* dalam program pemberdayaan masyarakat yaitu komunikasi, koordinasi dan kerjasama.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian secara langsung dan analisis data, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Kepentingan *stakeholder* dalam pemberdayaan masyarakat yaitu melakukan program kerja dan melakukan penguatan kapasitas masyarakat sesuai tupoksi.
2. *Stakeholder* yang berkepentingan terhadap program pemberdayaan masyarakat di Hutan Desa Namo yaitu dari instansi pemerintah, instansi swasta dan Tokoh Masyarakat, *stakeholder* tersebut adalah Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) Namo, Dinas Kehutanan (DISHUT) Provinsi Sulawesi Tengah, BPDAS HL Palu-Poso, Kesatuan Pengelolahan Hutan (KPH) Kulawi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sigi, IMUNITAS (LSM), Yayasan Jembata (LSM), dan Lembaga Adat Namo.
3. *Stakeholder* yang berada pada posisi *Key Player* yaitu Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) Sigi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sigi, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, dan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Sigi. *Stakeholder* yang berada pada posisi *Subjek* yaitu BPDAS HL Palu-Poso dan Lembaga Swadaya Masyarakat (IMUNITAS). *Stakeholder* yang berada pada posisi *Crowd* yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat (Yayasan JEMBATA), dan *stakeholder* yang berada

pada posisi *Context Setter* adalah Lembaga Adat Namo.

3. Kerjasama antar kelompok *key player* yang berkepentingan dalam program pemberdayaan masyarakat belum maksimal, hal ini dikarenakan koordinasi antar *stakeholder* belum optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin B. 2008. *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Ed ke-1. Jakarta: Kencana.
- Hafizi M. Z., Golar, G., & Sudhartono, A. (2016). Pola Pemberdayaan Masyarakat Di Hulu Sub Daerah Aliran Sungai Miu (Kasus Penerapan Program SCBFWM di Desa Winatu Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah). *Jurnal Warta Rimba*, 4(1).
- Hakim I. 2009. Kajian Kelembagaan dan Kebijakan hutan Tanaman Rakyat. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*
- Hasibuan, Malayu SP, 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia : Dasar Pengertian Dan Masalah*, PT Bumi Aksara, Jakarta
- Laksono R. 2012. Identifikasi karakteristik berbagai pengelolaan wisata alam di Kabupaten Bogor. [skripsi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Mondo A. J., Akhbar, & Golar. (2015). Kelembagaan Hutan Desa Di Desa Lonca Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi. *Jurnal Warta Rimba*, 4(2)
- Muntasib H. 2009. Tata Kelola Pariwisata Alam di Indonesia. Di Dalam Seminar Kebijakan, Tantangan dan Peluang Pariwisata Alam di Indonesia. Asosiasi

- Pariwisata Alam Indonesia (APAI). Gedung Manggala Wanabakti. Jakarta. 21-22 Juli 2009.
- Ngakan Putu Oka, Komarudin Heru, Achmad Amran, Wahyudi dan Tako Akhmad, 2006. Ketergantungan, Persepsi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Sumberdaya Hayati Hutan Studi Kasus di Dusun Pampli Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Center for International Forestry Research (CIFOR): Intriprima Karya, Jakarta.
- Nyoman. 2011. Modal Sosial dan Pembangunan Wilayah (Menkaji Succes Story Pembangunan di Bali). Universitas Brawijaya Press (UB Press). Malang.
- Reed, M.S, A. Graves, N. Dandy, H. Posthumus, K. Hubacek, J. Morris, C. Prell, C.H. Quinn, L.C. Stringer. 2009. *Who's In And Why? A Typology Of Stakeholder Analysis Methods For Natural Resource Management*. Journal of Environmental Management 90 (2009) 1933–1949. Elsevier.
- Riani MW. 2012. Mekanisme hubungan para pihak dalam pengelolaan wisata alam di Kota Bandar Lampung dan sekitarnya Provinsi Lampung. [skripsi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suporahardjo, editor. 2005. Manajemen Kolaborasi: Memahami Pluralisme Membangun Konsensus. Penerjemah: Assagaf M, Trajudi D, Sileuw I, Djatmiko WA, Sumarno A. Bogor: Pustaka Latin. Terjemahan dari: berbagai artikel dan berbagai sumber.
- Teguh, 2004, Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Yogyakarta : Graha Ilmu